BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh *intergovernmental revenue*, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan *intergovernmental revenue* cenderung menurunkan rasio efisiensi. Karena kinerja keuangan diukur menggunakan rasio efisiensi, maka penurunan rasio efisiensi menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih berperan penting dalam mendukung efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah belum menjadi faktor utama yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah karena kontribusinya masih relatif terbatas dibandingkan sumber pendapatan lainnya.
3. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal cenderung meningkatkan rasio efisiensi. Karena rasio efisiensi

yang semakin tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin kurang efisien, maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum sepenuhnya mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat belanja modal memerlukan waktu agar dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik maupun kinerja keuangan daerah.

4. *Intergovernmental revenue*, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh keterkaitan antara kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan serta mengelola pengeluaran daerah. Meskipun demikian, nilai koefisien determinasi sebesar 15,25% menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola *intergovernmental revenue* secara lebih efektif dan produktif. Dana transfer dari pemerintah pusat sebaiknya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin, tetapi juga diarahkan pada program yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa mengabaikan efisiensi belanja. Meskipun PAD dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, PAD tetap menjadi komponen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh

karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem pendataan objek pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.

3. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kualitas dan efektivitas belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal cenderung meningkatkan rasio efisiensi, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja modal benar-benar diarahkan pada program yang produktif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Perencanaan belanja modal sebaiknya didasarkan pada kebutuhan prioritas daerah, bukan hanya pada peningkatan nominal anggaran.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian belanja daerah. Karena rata-rata rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang cenderung belum efisien, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Pengendalian belanja, evaluasi program, dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran menjadi hal penting agar belanja daerah tidak melebihi kemampuan pendapatan yang tersedia.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja operasional, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan daerah, opini audit, SiLPA, pertumbuhan ekonomi, atau rasio kemandirian keuangan daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang periode penelitian atau menggunakan pendekatan lag pada variabel belanja modal, karena dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah umumnya tidak selalu terlihat pada tahun yang sama.